

ABSTRAK

Korupsi merupakan penghalang dalam mewujudkan *good governance* pada sektor pemerintahan. Dalam survei pada tahun 2011, Transparency International Indonesia menempatkan Indonesia pada urutan ke-100 dengan Indeks Persepsi Korupsi sebesar 3.0 bersama dengan 11 negara lainnya. Selain itu, pada survei yang sama pada tahun 2008 menempatkan institusi Bea dan Cukai pada posisi kedua dalam hal indeks suap sebesar 41%. Penelitian ini akan menjawab bagaimana implementasi upaya pencegahan tindak korupsi demi terwujudnya *good governance* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, data diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan informan serta referensi dari buku dan sumber internet yang relevan dan dapat dipercaya. Upaya pencegahan tindak korupsi demi terwujudnya *good governance* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya dapat dilihat dari empat sisi, yaitu sisi penampilan, sisi Sumber Daya Manusia, sisi organisasi, dan sisi perangkat lunak. Selain itu diketahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya-upaya tersebut serta contoh pemberian hukuman kepada pegawai yang melakukan tindakan yang mengarah pada kecurangan atau korupsi.

Kata kunci: Korupsi, *Good Governance*, Indeks Persepsi Korupsi, Sisi Penampilan, Sisi Sumber Daya Manusia, Sisi Organisasi, Sisi Perangkat Lunak